

## MINIMNYA PARTISIPASI BERMAKNA GURU DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Syafana Azelita Putri<sup>1</sup>, Diyas Age Larasati<sup>2</sup>, Hikmah Putri Amelia<sup>3</sup>, Syal Sa Billa Intan Romadona<sup>4</sup>, Gandes Larasati<sup>5</sup>, Muhammad Navis Roihan Daru Noorwinanda<sup>6</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup>Universitas Wijaya Kusuma, Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
Email: [putrisafana730@gmail.com](mailto:putrisafana730@gmail.com)

---

### Article History

Received: 25-06-2025

Revision: 13-07-2025

Accepted: 20-07-2025

Published: 27-07-2025

**Abstract.** This study discusses that various problems, including those faced by teachers and the education system as a whole, are caused by low participation in determining education policy. The quality of education depends on teachers, irrelevant curricula, uneven distribution of teachers, and excessive administrative burdens hinder teachers' work. This study aims to describe the challenges of education and education policy. The study uses a descriptive qualitative approach with a library research method whose data comes from various sources of articles in electronic journals based on Google Scholar data. The data analysis stages are carried out starting from article collection, article reduction, article display, discussion, and conclusions. The study shows that the limited number of teachers and qualifications impacts the quality of learning in remote areas. Strategic approaches are needed such as including training programs and incentives to improve education services. The Total Quality Management (TQM) approach is a strategy to improve the quality of education. TQM prioritizes the active participation of every member of the organization in continuous quality improvement through strong collaboration, continuous process development, and a focus on customer satisfaction. In education, the main consumers are students, parents, and the community, and the focus of improvement must be on their needs.

**Keywords:** Education Policy, Education Challenges, Total Quality Management

**Abstrak.** Penelitian ini membahas bahwa berbagai masalah, termasuk masalah yang dihadapi oleh guru dan sistem pendidikan secara keseluruhan, disebabkan oleh partisipasi yang rendah dalam penentuan kebijakan pendidikan. Kualitas pendidikan bergantung pada guru, kurikulum yang tidak relevan, distribusi guru yang tidak merata, dan beban administrasi yang berlebihan menghambat pekerjaan guru. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tantangan pendidikan dan kebijakan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang datanya berasal dari berbagai sumber artikel pada jurnal elektronik berbasis data *google scholar*. Tahapan analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan artikel, reduksi artikel, *display* artikel, pembahasan, diskusi, dan kesimpulan. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah guru dan kualifikasi berdampak pada kualitas pembelajaran di daerah terpencil. Pendekatan strategis diperlukan seperti mencakup program pelatihan dan insentif dapat meningkatkan layanan pendidikan. Pendekatan *Total Quality Management* (TQM) adalah strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. TQM mengutamakan partisipasi aktif setiap anggota organisasi dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan melalui kerja sama yang kuat, pengembangan proses yang berkelanjutan, dan fokus pada kepuasan konsumen. Dalam pendidikan, konsumen utama adalah siswa, orang tua, dan masyarakat, dan fokus perbaikan harus berada pada kebutuhan mereka.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Tantangan Pendidikan, Manajemen Kualitas Total

---

**How to Cite:** Putri, S. A., Larasati, D. A., Amelia, H. P., Romadona, S. S. B. I., Larasati, G., & Noorwinanda, M. N. R. D. (2025). Minimnya Partisipasi Bermakna Guru dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (4), 6494-6503. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3587>

---

## PENDAHULUAN

Tantangan dalam kebijakan pendidikan guru meliputi kurikulum yang tidak relevan, distribusi guru yang tidak merata, beban administrasi yang berlebihan, dan minimnya pelatihan. Perubahan menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Permasalahan dalam pendidikan dasar bukanlah sekadar isu eksklusif, melainkan kompleksitas dari berbagai faktor yang saling terkait. Mulai dari kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya efektif, keterbatasan sumber daya, hingga faktor sosial budaya yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang telah diidentifikasi, diperlukan solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, sekolah, guru, hingga orang tua. (Hasibuan & Martha, n.d., 2025)

Mata pelajaran yang membutuhkan tenaga pendidik yang ahli pada bidangnya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam suatu instansi pendidikan, agar siswa mendapatkan materi pembelajaran secara maksimal. Penelitian tentang keterbatasan guru Pendidikan di SMP yang terletak pada Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Memiliki tantangan besar yang dihadapi seperti keterbatasan jumlah dan kualifikasi pendidik, terutama di daerah-daerah terpencil. Masalah ini menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, sehingga banyak siswa tidak mendapatkan pembelajaran secara optimal. Pendekatan strategis, seperti program pelatihan, insentif bagi pendidik, dan peningkatan kerjasama antar pihak, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Hal tersebut diharapkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter peserta didik. (Hanisa & Yusuf, 2025)

Tantangan pendidikan di daerah terpencil tidak ada ujung penyelesaian hingga saat ini, seperti pada Sekolah Dasar daerah Lebak, Banten terdapat penelitian menjelaskan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi pada Sekolah Dasar pada daerah Lebak, Banten yaitu minimnya infrastruktur, keterbatasan tenaga pendidik, serta terbatasnya akses ke sumber belajar modern. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. (Berliana et al., 2024)

Lingkungan yang kurang mendukung, anggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, serta kurangnya motivasi dan dorongan menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil menurut Amir et al (Berliana et al., 2024) Selain itu, faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, semakin memperburuk kesenjangan pendidikan di pedesaan. (Mills & Gale dalam Berliana, 2024)

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya guru berkualitas merupakan tantangan utama Pendidikan di daerah terpencil. Ada beberapa pendekatan yang telah diusulkan untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah terpencil menurut (Yusuf et al dalam Berliana et al., 2024) menyarankan pemberian insentif yang kompetitif untuk menarik guru berkualitas bekerja di daerah terpencil. Menurut (Putri dalam Berliana et al., 2024) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi, seperti pembelajaran daring dan modul digital, dapat menjadi solusi untuk keterbatasan akses. Menurut (Supriyadi dalam Berliana et al., 2024) melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi lokal dalam pendidikan dasar.

Menyinggung penerapan *Total Quality Management (TQM)* Madrasah Ibtidaiyah daerah Batukliang Utara ternyata pada MTS Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur juga menggunakan pendekatan TQM untuk strategi peningkatan mutu pendidikan. Hal itu dikarenakan bahwa hambatan utama dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi tenaga pendidik di bidang tertentu, serta kurang optimal komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Selain itu, kendala dalam implementasi TQM di Madrasah ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep TQM di kalangan tenaga pendidik dan *staff*. Strategi peningkatan mutu pendidikan yang diusulkan mencakup penyediaan pelatihan berkala untuk guru, optimalisasi peran manajemen mutu melalui perbaikan sistem evaluasi, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak eksternal untuk mendukung keberlanjutan program. (Firdaus et al, 2025)

(Dewi & Suriansyah, 2025) kualitas pendidikan di Indonesia terus menjadi fokus utama masyarakat karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di era globalisasi. Tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, memerlukan intervensi yang tepat. (Ainscow dalam Dewi & Suriansyah, 2025)

Kualitas pendidikan di Papua merupakan salah satu perlunya perhatian yang signifikan, karena sering kali mendapatkan laporan bahwa kualitas pendidikan di Papua sangat kurang. (Ibaadurrahman et al., 2024) menjelaskan bahwa Pendidikan di Papua mengalami berbagai tantangan seperti kurangnya tenaga pendidik, minimnya infrastruktur, serta kualitas kurikulum yang belum tepat. Hal tersebut terjadi karena ada faktor penyebab yaitu mengalami berbagai hambatan dari segi geografis, struktural, kultural yang akan menghambat kebijakan. Dibutuhkan penguatan kebijakan berbasis kebutuhan lokal serta kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua yang menganjurkan penguatan peran otonomi khusus dalam pendidikan berbasis kearifan lokal serta peningkatan kapasitas guru sebagai

upaya menciptakan pemerataan pendidikan yang berkeadilan di Papua. (Ibaadurrahman et al., 2024)

Kurikulum di Indonesia setiap berganti periode pemerintahan selalu terjadi perubahan kurikulum. Hal itu akan berdampak pada guru dan juga peserta didik. Pada penelitian (Aprianti & Maulian, 2023) dijelaskan bahwa kebijakan kurikulum yang sering berubah-ubah atau sering diganti tidak hanya memberikan dampak positif dan negatif ke peserta didik karena prestasi menurun, akan tetapi berdampak juga pada sekolah yaitu berhubungan dengan visi misi dan tujuan sekolah yang dapat mengurangi kadar sekolah dalam membangun reputasi dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu perubahan kurikulum membawa dampak negatif tidak tercapainya target pendidikan di sekolah pada awal penerapan. Terutama karena guru mungkin belum siap atau belum sepenuhnya menguasai kurikulum baru. Dimana guru dituntut untuk benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponen jika ingin menerapkannya dengan hasil yang diharapkan. (Aprianti & Maulia, 2023)

Pada kurikulum merdeka belajar merupakan masa transformasi kebijakan pendidikan. Pada penelitian (Lembong et al., 2023) juga memiliki berbagai tantangan diantaranya adaptasi selama pandemi, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, pemahaman yang terbatas, dan perbaikan kualitas pembelajaran dan SDM. Sehingga kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi dan karakter siswa, mengurangi beban administratif guru, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kebijakan Merdeka Belajar terus memperbaiki sistem pendidikan dan mendorong pertumbuhan generasi muda berkualitas. (Lembong et al., 2023)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks perubahan kurikulum dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Subjek penelitian berupa 11 artikel nasional yang relevan dan terakreditasi, diperoleh melalui penelusuran sistematis di basis data *Google Scholar*. Pemilihan jurnal dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan topik minimnya partisipasi guru dalam kebijakan pendidikan, terutama yang membahas implementasi kurikulum. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara indentifikasi masalah, selanjutnya melakukan penyaringan data yang akan digunakan berkaitan dengan penelitian. Kemudian artikel yang

sudah dilakukan penyaringan di analisis untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung terkait penelitian.

Menurut (Aprianti & Maulia, 2023) studi pustaka merupakan metode yang mengandalkan sumber tertulis sebagai dasar dalam menganalisis fenomena sosial seperti kebijakan pendidikan. Mereka menekankan pentingnya pengelompokan dan interpretasi data guna menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap isu yang dikaji. Menurut (Lembong et al., 2023) juga menggunakan pendekatan serupa, yakni studi literatur dalam kerangka penelitian kualitatif, untuk menggambarkan kompleksitas perubahan kebijakan pendidikan. Mereka menekankan pentingnya analisis naratif sebagai pendekatan untuk mengungkap dinamika sosial yang menyertai implementasi kebijakan di lapangan. Teknik analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan artikel sesuai topik masalah, reduksi artikel, *display* artikel, lalu pada tahap pembahasan serta diskusi dilanjutkan kesimpulan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berdasarkan beberapa artikel, langkah pertama pengumpulan artikel berdasarkan variabel yang ada pada topik judul, yaitu minimnya partisipasi bermakna guru dalam perumusan kebijakan pendidikan, dari 11 artikel terdapat 4 artikel yang sesuai pada topik pembahasan. Terdapat 7 artikel yang harus dibuang dikarenakan terdapat beberapa variabel yang tidak selaras dengan topik. Artikel 7 itu dibuang karena alasan tidak ada variable yang relevan dengan topik yang diangkat. Terdapat artikel yang hanya membahas masalah *stakeholder* saja tidak dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Artikel yang relevan dengan topik pembahasan berjumlah 4 artikel *display* pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1.** *Display* Artikel

No.	Nama Penulis Artikel dan Tahun Terbit	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume Nomor	Jumlah Halaman
1	(Berliana et al., 2024)	Tantangan Dan Solusi Pendidikan Di Daerah Terpencil: Studi Kasus Di Desa Cisampang	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi & Bisnis	Vol. 4, 2	23 Halaman (Hal. 1 – 23)
2	(Hafizin et al., 2024)	Kebijakan Pengelolaan Guru Sekolah Dasar: Permasalahan Dan Solusi	Jurnal Kajian Islam Modern	Vol. 10, 2	43 Halaman (Hal. 1 – 24)

3	(Firdaus et al, 2025)	Analisi Hambatan Dan Strategi Peningkatam Mutu Pendidikan Di MTS Tarbiyatus Shibyan Wal Banat Berdasarkan TQM	Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam	Vol. 16, 2	24 Halaman (Hal. 1 – 24)
4	(Hasibuan & Martha, n.d., 2025)	Kebijakan Pendidikan Guru Sekolah Dasar: Apa Yang Salah Dan Bagaimana Memperbaikinya?	Jurnal Intelek Insan Cendikia	Vol. 2, 1	9 Halaman (Hal. 1 – 9)

Artikel Berliana et al., (2024) membahas tentang faktor utamanya ialah kekurangan guru berkualitas karena kebijakan pemerintah yang tidak optimal. faktor keterbatasan infrastruktur sekolah yang belum memadai, kurangnya akses teknologi dan tenaga pelajaran yang terlatih menjelaskan materi, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Upaya pemerintah daerah yang dapat dilakukan pelatihan intensif untuk guru, penyediaan sarana teknologi, dan keterlibatan lebih aktif dari pemerintah daerah.

Artikel 2 Hafizin et al., (2024) berfokus pada kebijakan - kebijakan yang di lakukan melalui beberapa tahapan yaitu (1) rekrutmen dan Seleksi, proses rekrutmen guru harus memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki keahlian akademik, keterampilan mengajar, dan komitmen terhadap pendidikan, (2) penempatan atau distribusi guru perlu dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan kebutuhan sekolah suatu wilayah, dan (3) jaminan gaji yang adil, fasilitas kerja yang baik, dan dukungan dari kepemimpinan sekolah dapat berkontribusi pada kesejahteraan guru. Tujuan dilakukannya *assesment* kebutuhan guru ialah meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah dengan memastikan guru memiliki kompetensi yang sesuai. Tetapi di sisi lain kebijakan pemerintah harus optimal juga dengan menyediakan program afirmasi untuk memenuhi kebutuhan guru, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Artikel 3 Firdaus et al, (2025) Menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana seperti yang terbatas seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan menghambat proses pembelajaran yang efektif sehingga motivasi peserta didik cenderung rendah untuk mengikuti proses pembelajaran, serta kurangnya dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk partisipasi aktif dan dukungan finansial. Keterbatasan sumber daya finansial yaitu anggaran yang terbatas membatasi upaya peningkatan kualitas pendidikan, seperti perbaikan fasilitas, pelatihan guru, dan pengadaan teknologi pembelajaran. Kebijakan yang diambil dari hambatan tersebut yaitu dengan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan menyediakan fasilitas yang memadai,

metode pembelajaran yang inovatif, dan guru yang kompeten. Keterlibatan semua pihak *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kegiatan pembelajaran. Tetap melakukan Perbaikan berkelanjutan, sehingga secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Artikel 4 Hasibuan & Martha (2025) lebih menekankan pada kurikulum pendidikan yang tidak relevan dengan kebijakan pemerintah, distribusi guru yang tidak merata, beban administrasi yang berlebihan, dan minimnya pelatihan menghambat peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah yang tegas sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun kebijakan sudah ada, kesenjangan pendidikan, dan kurangnya investasi dalam pendidikan menjadi beberapa kendala yang menghambat kemajuan. Dengan terus melaksanakan evaluasi yang berkelanjutan dan implementasi yang konsisten, kebijakan pendidikan dapat efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi muda untuk masa yang akan datang.

## **DISKUSI**

Hambatan dari ke 4 artikel tersebut sangat mengacu pada distribusi guru atau penempatan guru yang tidak sesuai kebutuhan sekolah di Indonesia. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud membuat kesimpulan bahwa hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat guru di tingkat kabupaten/kota. Akan tetapi pengangkatan guru tidak disertai dengan pendistribusian guru yang baik. Akibatnya, di dalam satu provinsi atau kabupaten/kota, ada beberapa daerah yang kelebihan guru, tetapi daerah lain malah kekurangan guru.

Distribusi guru yang tidak merata bukanlah masalah yang biasa, banyak faktor yang saling terkait. Terdapat tiga faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap kebijakan distribusi guru yaitu (1) ketiadaan regulasi penempatan dan distribusi guru dalam bentuk payung hukum yang kuat, (2) lemahnya sistem data informasi kependidikan, (3) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Minimnya pelatihan guru juga mempengaruhi hal tersebut peningkatan kualitas pengajaran, pemahaman kurikulum yang lebih baik, pengembangan keterampilan baru, dan peningkatan motivasi guru akan mencetak guru yang unggul, jika suatu pendidikan memiliki guru yang unggul, maka sistem pendidikan juga akan berkualitas serta akan mencetak generasi emas. Distribusi guru yang tidak merata harus segera diatasi karena akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan mutu pendidikan. Oleh karena ini perlu dipikirkan agar ada manajemen yang lebih baik. Teori Behaviorisme dapat digunakan karena menekankan pada

pembentukan perilaku yang diinginkan. Perubahan perilaku melalui stimulus dan respon, yang bisa diterapkan dalam pelatihan dan motivasi guru untuk mengajar di daerah terpencil. Dengan menerapkan pendekatan teori yang berbasis Teori Behaviorisme, diharapkan distribusi guru dapat lebih merata, kualitas pendidikan dapat meningkat, dan setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama (Abidin et al., 2022)

Kendala yang sering juga muncul fasilitas yang kurang memadai, mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik seperti bangunan sekolah yang tidak layak, ketersediaan ruang kelas yang terbatas, hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan toilet yang layak. Selain itu, minimnya akses terhadap materi pembelajaran, seperti buku pelajaran dan alat peraga atau media pembelajaran, serta terbatasnya akses internet juga menjadi kendala. Pemerintah harus memberi kebijakan sesuai kebutuhan pendidikan saat ini dengan menyediakan program beasiswa afirmasi untuk memenuhi kebutuhan guru, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan dengan kebutuhan guru di daerah terpencil, Misalnya pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, dukungan atau partisipasi aktif dari masyarakat juga diperlukan (Ayusaputri et al, 2024)

Masyarakat dapat berperan dalam berbagai cara, seperti memberikan sumbangan *material* maupun *nonmaterial*, menyediakan fasilitas, menjadi relawan pengajar, atau membantu kegiatan sekolah lainnya. Selain itu, partisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah dan memberikan masukan juga sangat berharga, termasuk orang tua siswa hingga komite sekolah. Teori Model Taba mengaitkan dengan tema yang terkait, model ini menekankan pentingnya tujuan pendidikan yang jelas, pengalaman belajar yang relevan, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi. Azzahra et al., (2022) Kebijakan pendidikan mungkin berkaitan dengan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan siswa. Kebijakan pemerintah dalam distribusi guru juga perlu mempertimbangkan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, serta relevansinya dengan kurikulum yang dikembangkan (Muiz et al., 2024)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa minimnya partisipasi bermakna guru dalam perumusan kebijakan pendidikan berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Tantangan terbesar dalam pendidikan saat ini meliputi distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kualitas pelatihan guru, beban administratif yang tinggi, keterbatasan infrastruktur sekolah, serta kurangnya dukungan kebijakan afirmatif di daerah-daerah 3T. Hal ini menciptakan ketimpangan akses dan mutu

pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini terjadi karena seringnya perubahan kurikulum tanpa keterlibatan aktif guru dalam proses perumusannya. Hal ini menyebabkan guru kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dan menghambat proses pembelajaran yang optimal. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap konsep kebijakan seperti Merdeka Belajar maupun pendekatan *Total Quality Management* (TQM) juga menjadi hambatan untuk pendidikan secara menyeluruh.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran sentral guru. Melibatkan guru dalam perumusan kebijakan bukan hanya sebagai bentuk pengakuan atas profesionalisme mereka, melainkan sebagai strategi efektif untuk membangun kebijakan yang relevan, adaptif, dan berdampak nyata. Setiap proses pengambilan keputusan pendidikan guru wajib dilibatkan dan Indonesia akan memiliki sistem pendidikan yang lebih demokratis, inklusif, dan mampu mencetak generasi emas yang berkualitas untuk menghadapi tantangan zaman.

## REFERENSI

- Abidin, A. M., Sains, F., Teknologi, D., Makassar, A., Sultan, J., 63, A. N., Romangpolong, K., Somba Opu, K., Gowa, S., Selatan-92113, I., & Penulis, K. (2022). *Penerapan Teori Belajar Behaviorisme dalam Pembelajaran (Studi Pada Anak)*. 15(1), 1–8. <https://jurnal.iain-bone.ac.id>
- Azzahra, F., Permana, H., Fitriani, L., Putri, R. M., & Wulandari, S. (2022). Approaches and models development of 2013 Curriculum and Merdeka Curriculum. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 1(2), 189–204. <https://doi.org/10.17509/curricula.v1i2.52034>
- Berliana, N., Indah, N., Hamidah, F., Jasmi, R. A., Islam, B. K., Dakwah, F., Sultan, U., Hasanuddin Banten, M., Al-Qur'an Dan Tafsir, I., Ushuludin, F., Abad, D., & Banten, H. (2024). *Terpencil: Studi Kasus Di Desa Cisampang* (Vol. 4).
- Dewi & Suriansyah. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan: Studi Kualitatif Pada Sekolah Di Pedesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 5(1). <https://jurnalp4i.com/index.php/elementary>
- Fitrah, Muh. (2017). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>
- Galih Ayusaputri, K., & Alfrisqa Musatafa, I. (2024). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan*. 8. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i6.9082>
- Hafizin, H., Mukarromah, A., & Bayu Aditama, W. (2024). Kebijakan Pengelolaan Guru Sekolah Dasar: Permasalahan Dan Solusi. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(02), 35–43. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i02.393>
- Hasibuan, R. T., & Martha, A. (n.d.). *Kebijakan Pendidikan Guru Sekolah Dasar: Apa Yang Salah Dan Bagaimana Memperbaikinya? Primary School Teacher Education Policy: What's Wrong And How To Fix It?* <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

- Ibaadurrahman, M., Aidil Viqri, A., Nugraha Putra Wikarsa, A., & Jaya Rajasa, A. (2024). Kritik Dan Strategi Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Papua: Analisis Implementasi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia. In *Jurnal Studi Multidisipliner* (Vol. 8, Issue 12).
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (n.d.). *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Pendidikan dan Pengajaran, J., & Yusuf, I. (2025). *Cendikia*. 3(1), 311–320.